

**PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PADANG**

TESIS



**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan
gelar *Magister Chief Information Officer***

**Oleh:
DODI CANDRA
NIM. 1200148**

**PROGRAM PASCASARJANAFAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

ABSTRACT

Dodi Candra, 2014“The Strategic Planning for Information System at Regional Human Resources Agency of Padang City”

Regional Human Resources Agency of Padang City is one of the government institution in Padang City with jobs and responsibilities are complete in the development and services PNSD. It is very influential to the performance improvement of existing Government Apparatur in Padang City. Regional Human Resources Agency of Padang City required to adopt a strategic policy measures and accountability in order to achieve excellent service to all PNSD, both within itself and in all the existing environment SKPD Government of Padang City. Support information systems are aligned with organizational goals into something that absolutely must be applied.

This study used research method and development that refers to Ward and Peppard. Starting with an analysis of the business environment and information systems both internally and externally, then the analysis using the SWOT, CSF, PEST, Mc Farlan analysis was conduct next to create basic strategies to formulate a portfolio of strategic planning for information system.

The results of this study was Strategic Planning for Information System portfolio at Regional Human Resources Agency of Padang City which included information systems business strategy, management strategy and information technology strategy.

Keywords : *Information System, Ward and Peppard, SWOT, CSF, PEST, Mc Farlan*

ABSTRAK

Dodi Candra, 2014 “Perencanaan Strategis Sistem Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang”

Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di kota Padang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang cukup luas dan komplit dalam pembinaan, pelayanan dan pengembangan PNSD. Sekaligus sangat berpengaruh kepada peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan yang ada di Kota Padang. Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang dituntut untuk menetapkan langkah-langkah kebijakan strategis dan akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh PNSD, baik dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah sendiri maupun pada semua SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Padang. Dukungan sistem informasi yang selaras dengan tujuan organisasi menjadi sesuatu yang mutlak harus diterapkan.

Penelitian ini menggunakan metode *research and development* yang mengacu pada kerangka kerja Ward and Peppard (2002). Diawali dengan melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis dan sistem informasi baik internal maupun eksternal, selanjutnya dilakukan proses analisis dengan menggunakan metode analisis SWOT, CSF, PEST dan analisis Mc Farlan yang menghasilkan strategi-strategi dasar untuk penyusunan portofolio perencanaan strategis sistem informasi.

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah portofolio perencanaan strategis sistem informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang yang meliputi strategi bisnis sistem informasi, strategi manajemen dan strategi teknologi informasi.

Kata kunci : Sistem informasi, Ward and Peppard, SWOT, CSF, PEST, Mc Farlan.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : Dodi Candra
NIM : 1200148
Program Studi : Magister (S2) CIO

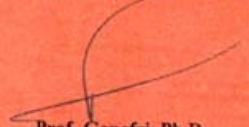
MENYETUJUI

Pembimbing I,



Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T.
NIP. 19591204 198503 1 004

Pembimbing II,



Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 19631217 198903 1 003

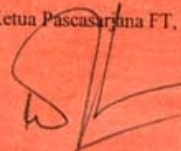
PENGESAHAN

Dekan,



Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 19631217 198903 1 003

Ketua Pascasarjana FT,



Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed.
NIP. 19520822 197710 1 001



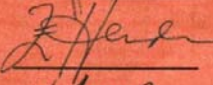
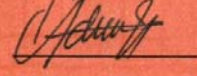
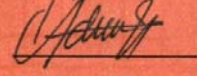
**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS**

TESIS

Mahasiswa : Dodi Candra
NIM : 1200148

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis

Program Magister *Chief Information Officer*
Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Tanggal : 25 Agustus 2014

No	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T.</u> (Ketua)	
2.	<u>Prof. Ganefri, Ph.D.</u> (Sekretaris)	
3.	<u>Drs. Syahril, S.T., MSCE., Ph.D.</u> (Anggota)	
4.	<u>Drs. Zuhendra, M.Kom.</u> (Anggota)	
5.	<u>Muhammad Adri, S.Pd., M.T.</u> (Anggota)	

Padang, 25 Agustus 2014
Program Studi Magister (S2) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Ketua,



Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T.
NIP. 19591204 198503 1 004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul "Perencanaan Strategis Sistem Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Agustus 2014
Saya yang menyatakan


6000
ENAM RIBU RUPIAH
Candra
NIM. 1200148

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat-Nya yang tak terhingga, syalawat dan salam teruntuk junjungan alam yakni nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Perencanaan Strategis Sistem Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang”

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Penelitian tesis ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang sekaligus sebagai pembimbing II yang telah membantu peneliti dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga penelitian tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M. Ed. selaku ketua Pasca Sarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T. selaku Ketua Program Studi S.2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang sekaligus sebagai pembimbing I yang telah membantu peneliti dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga penelitian tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Drs. Syahril, ST. MSCE., Ph.D., Drs. Zuhendra, M. Kom. dan Muhammad Adri, S.Pd., M.T. selaku Kontributor, Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini.

5. Kementrian Komunikasi dan Informatika khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah memberikan biaya pendidikan sampai selesainya penulisan tesis ini
6. Bapak Ir. H. Asnel, M. Si. selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang beserta seluruh jajarannya yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan informasi guna penyelesaian tesis ini.
7. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
8. Teman-teman seperjuangan Program Magister *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri yang telah memberikan bantuan moril dalam suka dan duka bersama.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu peneliti sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca yang budiman untuk kesempurnaan tesis yang akan datang.

Terakhir, peneliti menyampaikan harapan semoga penelitian yang disusun ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Padang, Agustus 2014
Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR	iii
PERSETUJUAN KOMISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Spesifikasi Produk yang Diharapkan	12
H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan	12
I. Definisi Operasional	12
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	14
1. Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	14
a. Pengertian Sistem Informasi	14
b. Pengertian Teknologi Informasi	16
2. Perencanaan Strategis Sistem Informasi	16
3. Perencanaan Strategis Teknologi Informasi	17
4. Strategi Bisnis	17

5. Hubungan antara Strategi Bisnis, Strategi SI dan Strategi TI.	17
6. Metodologi Perencanaan Strategis SI	20
a. Perencanaan Strategis SI menurut Tozer	20
b. Perencanaan Strategis SI menurut <i>Price Waterhouse</i>	24
c. Perencanaan Strategis SI Menurut Wetherbe.....	26
d. Perencanaan Strategis SI Model Ward and Peppard.....	27
1) Tahapan Masukan	27
2) Tahapan Proses Strategi SI	29
3) Tahapan keluaran	37
7. Proses Bisnis pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang	38
B. Penelitian Yang Relevan	40
C. Kerangka Konseptual	41
D. Pertanyaan Penelitian	43

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Model Pengembangan.....	44
B. Prosedur Pengembangan	44
C. Uji Coba Produk	47
D. Subjek Ujicoba.....	49
E. Jenis Data	49
F. Instrumen pengumpulan data	50
G. Pengembangan Instrumen	52
H. Teknik Analisis Data.....	53

BAB IV. HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Ujicoba.....	55
1. Tahapan Masukan	55
a. Kondisi Lingkungan Bisnis Internal	55
b. Kondisi Lingkungan Bisnis Eksternal	71
c. Kondisi Lingkungan SI Internal.....	72
d. Kondisi Lingkungan SI Eksternal	77
2. Tahapan Proses Strategi SI	86
a. Analisis Lingkungan Bisnis	86

1) Analisis SWOT	86
2) Analisis <i>Critical Success Factor (CSF)</i>	88
b. Analisis Lingkungan SI	90
3. Tahapan keluaran	90
a. Strategi Bisnis Sistem Informasi	90
b. Strategi Manajemen	91
c. Strategi Teknologi Informasi	94
B. Hasil Uji Coba Produk	95
1. Uji Validitas	96
2. Uji Efektifitas	96
3. Uji Praktikalitas	97
C. Pembahasan	97
D. Keterbatasan Penelitian	99
BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	100
B. Implikasi	101
C. Saran	101
DAFTAR RUJUKAN	102
LAMPIRAN	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Hubungan antara Strategi Bisnis, Strategi SI dan Strategi TI.....	18
2.2 Diagram Perencanaan Strategis SI versi Tozer	20
2.3 Bagan Ringkasan Metodologi <i>Price Waterhouse</i>	24
2.4 Perencanaan Strategis SI Wetherbe	26
2.5 Model Perencanaan Strategis SI	28
2.6 Matriks Analisis SWOT.....	31
2.7 <i>Critical Success Factor</i>	35
2.8 <i>Mc Farlan Strategic Grid</i>	36
2.9 Kerangka Pikir	43
3.1 Prosedur Pengembangan.....	46
4.1 Struktur Organisasi BKD Kota Padang	59
4.2 Topologi Jaringan pada BKD Kota Padang.....	77
4.3 Analisis Aplikasi <i>Portfolio</i> Bisnis <i>McFarlan Grid'S</i> BKD Kota Padang	90
4.4 <i>Portfolio</i> aplikasi BKD Kota Padang	91
4.5 SOTK baru Sub Bagian Sistem Informasi.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang Tahun 2014.....	4
1.2 Rekapitulasi PNSD Pemerintah Kota Padang Berdasarkan Jabatan	5
1.3 Komposisi pegawai BKD Kota Padang.....	6
3.1 Rumus Perhitungan pada Skala <i>Likert</i>	48
3.2 Interpretasi Skor Skala <i>Likert</i>	48
3.3 Pedoman Wawancara.....	52
3.2 Pedoman Observasi.....	53
4.1 Komposisi Pegawai BKD Kota Padang.....	71
4.2 Perangkat Keras TI BKD Kota Padang	73
4.3 Komposisi SDM SI BKD Kota Padang.....	77
4.4 Matriks Analisis SWOT pada BKD Kota Padang.....	88
4.5 Hubungan SWOT dan CSF pada BKD Kota Padang.....	89
4.6 Identifikasi Kebutuhan Informasi BKD Kota Padang	89
4.7 <i>Portfolio</i> Sistem Informasi pada BKD Kota Padang.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Keterangan Penelitian.....	104
2. Pedoman Wawancara.....	105
3. Kuesioner Uji Validitas	122
4. Hasil Uji Validitas	123
5. Kuesioner Uji Efektifitas	126
6. Hasil Uji Efektifitas	127
7. Kuesioner Uji Praktikalitas.....	130
8. Hasil Uji Praktikalitas.....	131
9. Produk Penelitian.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap sistem informasi yang ada pada suatu organisasi. Dampak dari hal tersebut adalah banyak organisasi yang berlomba-lomba untuk menerapkan sistem informasi dengan hanya memperhatikan kebutuhan sesaat yang mengakibatkan penerapan sistem informasi yang saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya.

Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah di jangkau secara interaktif. Pemerintah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai suatu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*public-privatepartnership*), memanfaatkan kemajuan sistem informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-Government* (Menkominfo, 2003).

Kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* yang dituangkan dalam Inpres no. 3 Tahun 2003 menjadi alasan diperlukannya

pengembangan perencanaan strategis sistem informasi di pemerintah daerah. Perencanaan strategis dilakukan agar implementasi sistem informasi sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta dapat menyesuaikan dengan kemampuan dana yang dimiliki oleh organisasi/instansi yang bersangkutan.

Sebagaimana kita ketahui fungsi pengelola data dan informasi ini, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan di instansi pemerintah maka wajar kalau pemerintah berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumber daya yang lain. Sistem informasi kini telah menjadi kerangka dasar bagi semua aktivitas pemerintahan dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif.

Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan ini dan didorong dengan pesatnya perkembangan sistem informasi sekarang ini, perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi sistem informasi dalam pemerintahan. Tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan sistem informasi akan menjadi sia-sia, investasi besar yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, bertanggungjawab pada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Manajemen kepegawaian di sini mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pengangkatan dan pemberhentian PNSD
- b) Penyusunan dan penetapan formasi PNSD
- c) Pengadaan PNSD
- d) Kenaikan pangkat dan mutasi PNSD
- e) Pengangkatan PNSD dalam jabatan struktural

f) Penyelenggaraan Diklat Jabatan PNSD

Menurut Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang 2009-2014, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang memiliki visi “terwujudnya SDM Pemerintah Daerah Kota Padang yang berkualitas melalui pengembangan dan pembinaan kepegawaian secara professional tahun 2014” dan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan rekrutmen pegawai.
2. Melakukan upaya penataan pegawai.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pegawai.
4. Meningkatkan disiplin pegawai.
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pegawai.
7. Menyelenggarakan dan memelihara data dan informasi kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang cukup luas dan komplit dalam pembinaan, pelayanan dan pengembangan PNSD, sekaligus sangat berpengaruh kepada peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan yang ada di Kota Padang. BKD Kota Padang dituntut untuk menetapkan langkah-langkah kebijakan strategis dan akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh PNSD, baik dilingkungan BKD sendiri maupun pada semua SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Padang.

BKD Kota Padang juga bertanggung-jawab dalam mengolah data-data kepegawaian dan manajemen kepegawaian seluruh pegawai yang ada di Kota Padang. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data BKD Kota Padang pada tanggal 2 Februari 2014, PNSD yang ada di Kota Padang saat ini berjumlah 12.757 orang dan tersebar di berbagai unit kerja, maka dibutuhkan administrasi, manajemen, data dan informasi kepegawaian yang baik. Berikut ini dapat dilihat jumlah PNSD Kota Padang tahun 2014:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang Tahun 2014

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai
Kelompok Khusus	18 orang
Sekretariat DPRD	55 orang
Bagian Hukum	13 orang
Bagian Humas dan Protokol	13 orang
Bagian Kesejahteraan Rakyat	20 orang
Bagian Organisasi	11 orang
Bagian Pembangunan	15 orang
Bagian Pemerintahan	11 orang
Bagian Perekonomian	19 orang
Bagian Pertanahan	15 orang
Bagian Umum	78 orang
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	338 orang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	42 orang
Dinas Kelautan dan Perikanan	65 orang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44 orang
Dinas Kesehatan	982 orang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	39 orang
Dinas Pasar	116 orang
Dinas Pekerjaan Umum	114 orang
Dinas Pemuda dan Olahraga	43 orang
Dinas Pendidikan	7928 orang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset	135 orang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	209 orang
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	53 orang
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	175 orang
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	71 orang
Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan	90 orang
Badan Kepegawaian Daerah	59 orang
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	101 orang
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	53 orang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	112 orang
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	45 orang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49 orang
Inspektorat	62 orang

Sambungan tabel 1.1

Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	20 orang
Kantor Kesaatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	21 orang
Kantor Ketahanan Pangan	9 orang
Rumah Sakit Umum Daerah	254 orang
Satuan Polisi Pamong Praja	210 orang
Kecamatan Bungus Teluk Kabung	55 orang
Kecamatan Koto Tangah	148 orang
Kecamatan Kuranji	97 orang
Kecamatan Lubuk Begalung	119 orang
Kecamatan Lubuk Kilangan	73 orang
Kecamatan Nanggalo	74 orang
Kecamatan Padang Barat	101 orang
Kecamatan Padang Selatan	113 orang
Kecamatan Padang Timur	94 orang
Kecamatan Padang Utara	73 orang
Kecamatan Pauh	86 orang
Sekretariat KORPRI	8 orang
Komisi Pemilihan Umum	9 orang
JUMLAH	12757 orang

(Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data BKD Kota Padang)

Dari tabel diatas terlihat cakupan pelayanan BKD Kota Padang tersebar di berbagai SKPD dengan total jumlah pegawai yang sangat banyak bagi sebuah organisasi. Dari besarnya cakupan pelayanan BKD Kota Padang tersebut, masih dibedakan pula pegawai berdasarkan jabatannya. Dibawah ini adalah daftar jumlah PNSD berdasarkan jabatan:

Tabel 1.2 Rekapitulasi PNSD Pemerintah Kota Padang Berdasarkan Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Struktural	1369 orang
2	Fungsional Tertentu:	
	- Fungsional Medis	873 orang
	- Fungsional Guru	6966 orang
	- Fungsional Tertentu lainnya	197 orang
3	- Fungsional Umum	3352 orang
	JUMLAH	12757 orang

(Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data BKD Kota Padang)

Sementara jumlah pegawai yang ada pada BKD Kota Padang berjumlah 59 orang. Berikut komposisi pegawai yang ada di BKD Kota Padang dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3 Komposisi pegawai BKD Kota Padang

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	11 orang
2	D.III	8 orang
3	S.1	32 orang
4	S.2	8 orang

(Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data BKD Kota Padang)

Proses administrasi bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berjumlah besar tersebut memerlukan dukungan sistem informasi yang memadai agar tercipta sistem *recruitment* yang baik, jalur karier yang jelas, penilaian kinerja dan pengembangan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Thomas G. Spates mengatakan bahwa manajemen pegawai itu hakikatnya adalah administrasi kepegawaian, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan melakukan kegiatan administrasi kepegawaian yang baik, berarti telah memudahkan jalannya manajemen pegawai (dalam Miftah Thoha, 1983). BKD Kota Padang sebagai instansi yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian dituntut untuk dapat memanfaatkan informasi dan membuat keputusan secara tepat berdasarkan informasi-informasi tersebut. Administrasi kepegawaian yang baik akan menghasilkan data yang tepat dan akurat sehingga sangat mempengaruhi jalannya pengambilan keputusan.

Di era globalisasi saat ini, revolusi sistem informasi memberikan konsekuensi bagi para pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*) untuk pengembangan solusi akan sangat ditentukan oleh peranan sistem informasi. Penggunaan komputerisasi dalam manajemen organisasi publik merupakan salah satu jawaban dari tantangan yang dihadapi oleh penyelenggaraan administrasi publik terkait dengan era globalisasi dan informasi yakni *The Impact of Tecnology of Public Administration* (Hughes dalam Warsito Utomo, 2006). Besarnya cakupan pelayanan, kompleksitas tugas dan tantangan teknologi ini mendasari penggunaan sistem informasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang. Seperti penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK), dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang.

SIMPEG merupakan sistem informasi yang di bangun dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai pusat layanan informasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang dimana dalam aplikasi tersebut terdapat *database* kepegawaian yang lengkap. SIMPEG di BKD Kota Padang dibangun sebelum adanya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) online yakni pada tahun 2007, namun dalam pelaksanaannya ternyata SIMPEG belum dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan data hingga kebutuhan informasi bagi pelaksanaan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengolahan Data dan Dokumentasi BKD Kota Padang pada tanggal 2 Februari 2014 terdapat kendala dalam penerapan SIMPEG diantaranya proses *update* data yang masih sangat kurang hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan SKPD-SKPD yang ada dan kurangnya sumber daya manusia yang ada di dalam tim peremajaan data SIMPEG yang berjumlah 3 orang.

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) adalah sistem informasi berbasis komputer yang di susun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian. Sistem ini di bangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan PERKA BKN Nomor 18 tahun 2010 tentang SAPK On-Line dan diterapkan di tahun 2011 di BKN pusat dan beberapa kantor BKN regional lainnya. Pengaplikasian SAPK pada BKD Kota Padang baru pada tahun 2012. Sistem SAPK merupakan sistem yang terkoneksi secara online antara BKN pusat, Kantor Regional BKN dan instansi di daerah dengan menggunakan jaringan komunikasi data serta menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama. Sistem ini juga menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai standar baku yang disusun oleh BKN pusat dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) berbasis web diterapkan dalam berbagai layanan kepegawaian antara lain :

1. Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
2. Kenaikan pangkat
3. Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil
4. Perpindahan Antar Instansi

Untuk dapat menggunakan layanan ini, semua *stakeholders* BKN, khususnya unit kepegawaian di instansi Pusat maupun daerah termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus terkoneksi dengan SAPK. Penerapan SAPK akan memungkinkan *updating* data yang dilakukan unit kepegawaian/BKD, secara otomatis meng-*update database* Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di BKN. Dengan kondisi ini nantinya BKN akan memiliki *database* PNS seluruh Indonesia, yang akurat dan *update*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pangkat dan Pensiun BKD Kota Padang pada tanggal 3 Februari 2014 terdapat kendala dalam penerapan SAPK diantaranya proses koneksi ke sistem BKN yang susah, sering terjadi *lose connection* apalagi disaat periode-periode sibuk di saat periode kenaikan pangkat di bulan April dan Oktober serta kurangnya SDM SI sebagai operator SAPK yang berjumlah 2 orang.

Selain sistem informasi diatas, terdapat pula sistem informasi pendukung kegiatan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang yaitu: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem ini merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Aplikasi ini dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang pada Sub Bagian Keuangan di bawah Sekretariat dalam pengelolaan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang baik pengelolaan keuangan kegiatan rutin maupun pengelolaan penggajian pegawai.

Terdapat egosentris lokal pada masing-masing fungsi dalam bisnis unit berpengaruh pada kinerja dan interaksi antara sistem informasi pada masing-masing unit dan fungsi yang mengakibatkan integrasi data pun tidak maksimal

dan sistem informasi yang dikembangkan tidak optimal. Keakuratan data kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang masih kurang karena datanya dikelola secara terpisah. Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang ditemui adanya aplikasi sistem informasi dengan berbagai *platform* teknologi dan perangkat teknologi informasi pendukungnya pada masing-masing bidang. Sistem-sistem ini saling terpisah satu dengan yang lain, yang diiringi dengan banyak dan menyebarnya ‘pulau data’. Keterpisahan ini memberikan dampak yaitu rendahnya tingkat ketersediaan, konsistensi dan efektivitas penyediaan data sehingga pelayanan kepegawaian menjadi kurang optimal. Hal tersebut tentunya tidak akan terjadi jika masing-masing sistem dapat berkomunikasi dan saling berbagi data yang dibutuhkan. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan informasi kepegawaian yang ada tidak direncanakan secara baik. Hal ini mengakibatkan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem informasi yang tidak sejalan dengan strategi organisasi.
2. Pembangunan sistem informasi yang tidak terpola sehingga tidak terjadi keterpaduan antara sub-sistem yang ada (tidak terintegrasi, tidak holistik dan tidak koheren).
3. Alokasi dana investasi sistem informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang seharusnya (*under* atau *over investment*).
4. Penerapan berbagai sistem informasi yang tidak memperhatikan asas prioritas dan kritikalitas.

Perencanaan strategis sistem informasi merupakan salah satu pendekatan yang sistematis untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Terdapat tiga sasaran utama yang di harapkan dari penerapan perencanaan strategis sistem informasi yaitu memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan proses otomasi proses dalam mengelola informasi, meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan kebutuhan informasi untuk proses pengambilan keputusan dan meningkatkan keunggulan kompetitif dengan merubah gaya serta cara berbisnis (*Ward and Peppard, 2002*)

Atas dasar hal tersebut, maka dirasa perlu untuk menyusun Perencanaan Strategis Sistem informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang. Perencanaan strategis sistem informasi ini akan menjadi acuan untuk merencanakan pemanfaatan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan untuk menentukan strategi atau bentuk pengelolaan sistem informasi yang tepat untuk diterapkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang kedepannya.

Dalam proses penyusunan perencanaan strategis sistem informasi penggunaan metodologi merupakan faktor yang sangat menentukan. Ada beberapa metodologi perencanaan strategis sistem informasi yang populer, seperti: menurut Tozer, menurut *Price Waterhouse*, menurut Wetherbe dan menurut *Ward and Peppard*. Pada penelitian ini penulis menggunakan metodologi perencanaan strategis sistem informasi versi *Ward and Peppard* dengan menggunakan teknik analisis SWOT, CSF, PEST dan analisis portfolio *Mc Farlan Strategic Gird*. Alasan menggunakan metode Ward and Peppard karena memiliki kerangka kerja yang jelas, teknik-teknik analisis dapat digunakan sesuai dengan kerangka kerja yang dimiliki *Ward and Peppard* (A Surya Wicaksana, 2013).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka dapat diidentifikasi masalah yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam menunjang pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang.
2. Perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang yang ada belum secara rinci mengakomodir kebutuhan pengembangan sistem informasi.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan penelitian ini maka penulis membatasi permasalahannya hanya pada proses:

1. Hasil akhir dari penelitian ini berupa *portfolio* perencanaan strategis sistem informasi pada BKD Kota Padang.
2. Penelitian ini tidak membahas rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

D. Perumusan Masalah

Tidak adanya perencanaan strategis sistem informasi yang terstruktur dengan baik mengakibatkan implementasi sistem informasi tidak optimal. Atas dasar hal tersebut, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana membuat tahapan penyusunan perencanaan strategis sistem informasi yang tepat bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang?
2. Bagaimana *portfolio* perencanaan strategis sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan strategi bisnis sistem informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang.
2. Menghasilkan strategi manajemen pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang.
3. Menghasilkan strategi teknologi informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Perencanaan Strategis Sistem Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini, diharapkan akan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi BKD Kota Padang di dalam merencanakan pembangunan sistem informasi.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang dapat lebih memperkaya pengetahuan di bidang perencanaan strategis sistem informasi.

G. Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Dari penelitian ini, produk yang diharapkan berupa *portfolio* perencanaan strategis sistem informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang yang terdiri dari strategi bisnis sistem informasi, strategi manajemen dan strategi sistem informasi.

H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

Asumsi pengembangan dalam penelitian ini yaitu *portfolio* perencanaan strategis (strategi bisnis sistem informasi, strategi manajemen dan strategi teknologi informasi) yang dapat mendefinisikan sistem informasi yang diperlukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang. Namun demikian, produk yang dihasilkan memiliki keterbatasan yaitu kurangnya kemampuan peneliti dan waktu pengerjaan dalam menghasilkan *portfolio* perencanaan strategis sistem informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang.

I. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. BKD Kota Padang adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kota Padang yang bertugas melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

2. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perencanaan strategis sistem informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang yang valid, efektif dan praktis dilakukan melalui beberapa tahapan yang diawali tahap masukan, tahapan proses strategi SI dan tahapan keluaran. Pada tahapan masukan, dilakukan analisis terhadap kondisi lingkungan bisnis internal, kondisi lingkungan bisnis eksternal, kondisi lingkungan SI internal dan kondisi lingkungan SI eksternal. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, CSF, PEST dan Analisis Aplikasi *Portfolio* Bisnis *McFarlan Grid'S*. Dari analisis-analisis tersebut maka dapat dihasilkan sebuah *portfolio* perencanaan strategis sistem informasi yang valid, efektif dan praktis pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang.

Perencanaan strategis sistem informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang terdiri dari strategi bisnis sistem informasi, strategi manajemen dan strategi teknologi informasi. Strategi bisnis sistem informasi yang dihasilkan antara lain: memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang SI, menambah SDM SI yang masih sangat kurang, memanfaatkan perkembangan SI dengan peningkatan prasarana berbasis SI, peningkatan penataan manajemen kepegawaian dengan dukungan SI, merancang pedoman pengembangan SI yang sesuai dengan tupoksi, mengadopsi SI dalam layanan kepegawaian.

Strategi manajemen pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang yang dihasilkan antara lain: dengan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru Sub Bagian Sistem informasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang yang setingkat dengan Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan, pengembangan sistem informasi dilakukan melalui *outsourcing*, pengembangan sistem informasi dapat juga dilakukan dengan teknologi *cloud computing*.

Strategi teknologi informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang yang dihasilkan antara lain: adanya kebijakan terkait penambahan SDM sistem informasi dan penambahan kapasitas *bandwith* koneksi menjadi 2 Mbps mengingat beberapa aplikasi yang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil.

B. Implikasi

Dengan adanya *portfolio* perencanaan strategis sistem informasi maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang dapat menjadikannya sebagai acuan dalam pengembangan sistem informasi terkait pengelolaan sistem informasi pada BKD Kota Padang. Perencanaan strategis sistem informasi ini telah disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang ada pada kerangka kerja *Ward and Peppard* (2002).

Dukungan penuh dari semua pihak akan menentukan keberhasilan penerapan perencanaan strategis sistem informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang ini. Semua unsur pimpinan sampai kepada staf pelaksana harus satu visi terkait pengelolaan sistem informasi yang tepat guna dan tepat sasaran demi tercapainya keselarasan antara pemanfaatan SI dengan tupoksi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang .

C. Saran

Demi tercapainya optimalisasi penerapan perencanaan strategis sistem informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang, maka disarankan:

1. Adanya dukungan penuh dari semua pihak yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang terkait penerapan perencanaan strategis sistem informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk membahas rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang. 2009. *Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang 2009–2014*.
- Dedi Sutrisno. 2013, “*Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Solok*”. Tesis, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Padang, Padang.
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.2003.
- Jogiyanto, HM (2005). *Sistem Informasi Strategik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Laudon, Kenneth C. And Laudon, Jane Price.2007. *Management Information system: Managing the Digital Firm, 10th edition*. New Jersey; Pearson Prentice Hall.
- McLeod Raymond, (2004), *Sistem Informasi Manajemen*, jilid 1. PT. Prenhallindo, Jakarta.
- O’Brien, J.A. 2003. *Introduction to Information System Essential for E-Business Enterprise Eleventh Edition*. New York : Mc Graw Hill.
- O’Brien, J.A. 2006. *Introduction To Information System, 12th ed*. Diterjemahkan oleh Dewi Fitriyani, S.S., M.Si dan Deny Arnos Kwary, S.S, M.Hum. Arizona: Mc Graw Hill.
- Rangkuti, F., 2006, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, cetakan kedua belas, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Turban, Efraim; Rainer, R. Kelly, Jr; Potter, Richard E. (2003). *Introduction to Information Technology, second edition*. John Wiley & Sons, New-York.
- Ward, John and Joe Peppard. 2002. *Strategic Planning for information System 3rd ed*. England: John Wiley & Son.
- Wedhasmara, Ari. 2008. “*Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pada Organisasi Pemerintah Daerah*”. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Komputer UI.